

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga mengenai saran berdasarkan hasil penelitian. Secara umum peneliti menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi sangat membantu masyarakat miskin dalam memberikan bantuan-bantuan sosial baik dari segi bantuan langsung tunai maupun non tunai. Menanggulangi kemiskinan memang tidak sepenuhnya bisa teratasi dan harus membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak semudah memperbaiki kemiskinan tetapi pemerintah sudah mengoptimalkan tersebut. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai penyempurnaan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga mengenai saran berdasarkan hasil penelitian. Secara umum peneliti menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi sangat membantu masyarakat miskin dalam memberikan bantuan-bantuan sosial baik dari segi bantuan langsung tunai maupun non tunai. Menanggulangi kemiskinan memang tidak sepenuhnya bisa teratasi dan harus membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak semudah memperbaiki kemiskinan tetapi pemerintah sudah mengoptimalkan tersebut. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai penyempurnaan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui

sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi pihak-pihak atau informan yang terlihat yaitu; Masyarakat miskin, Dosen, dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ada beberapa yang harus diketahui mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dengan memberikan pemahaman mengenai kemiskinan dan menentukan beberapa target setahunnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan berkelanjutan.
4. Terdapat kelebihan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; mendukung bantuan dan memberikan bantuan-bantuan bagi segi tunai maupun non tunai dan harus memiliki data yang *realtime* dan *by name* dan *by address* nya agar dapat di *verifikasi* data nya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga mengenai saran berdasarkan hasil penelitian. Secara umum peneliti

menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi sangat membantu masyarakat miskin dalam memberikan bantuan-bantuan sosial baik dari segi bantuan langsung tunai maupun non tunai. Menanggulangi kemiskinan memang tidak sepenuhnya bisa teratasi dan harus membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak semudah memperbaiki kemiskinan tetapi pemerintah sudah mengoptimalkan tersebut. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai penyempurnaan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi pihak-pihak atau informan yang terlihat yaitu; Masyarakat miskin, Dosen, dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ada beberapa yang harus diketahui mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dengan memberikan pemahaman mengenai kemiskinan dan menentukan beberapa target setahunnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan berkelanjutan.
4. Terdapat kelebihan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; mendukung bantuan dan memberikan bantuan-bantuan bagi segi tunai maupun non tunai dan harus memiliki data yang *realtime* dan *by name* dan *by address* nya agar dapat di *verifikasi* data nya.
5. Terdapat kekurangan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; masih banyak nya salah sasaran dan tidak tepat dalam penyaluran distribusi bagi pemerintah untuk masyarakat miskin dan juga dalam penyampain informasinya kurang baik habis bagaimana masalahnya banyak kemiskinan gejolaknya dari pengusaha-pengusaha kecil sampai terjepit itu masalahnya yang kita tanyakan dan kurangnya perhatian pemerintah untuk masyarakat.
6. Kualitas bantuan masih terjadi yang kurang memadai seperti beras sembako dan lain-lain yang kurang kualitasnya.

7. Dalam penanggulangan kemiskinan kunci dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah berbasis kepada data dan di lihat tepat atau tidaknya suatu program yang di lakukan oleh desa setempat yang bisa di *support* dengan dana dan di dukung oleh kegiatan kegiatan seperti wirausaha yang di lakukan oleh masyarakat di desa tersebut untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan, dengan kebutuhan dari kegiatan yang ada dari Pemerintah Kabupaten Bekasi di harapkan berjalan dan bisa men-*support* kegiatan yang ada agar focus lebih tepat sasaran sehingga terjadi pengentasan kemiskinan dan masyarakat keluar dari garis kemiskinan baik dari pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia
8. Dalam *Sustainable Development Goals* menanggulangi kemiskinan itu semua harus berbasis data dan harus di *support* agar lebih cepat dan tepat sasaran kemudian cepat terentah orang miskin dan keluar dari lingkungan atau garis kemiskinan itu. Dan datanya juga harus *by name* dan *by address* serta harus *real time*.
9. Pemerintah harusnya bisa lebih perhatian kepada masyarakat agar tidak berada di zona kemiskinan terus menerus masyarakat juga ingin bebas dan juga mau berkembang agar tidak menghandalkan pemberian dari pemerintah dan kurang terkontrol dan masih banyaknya salah sasaran dalam pemberian bantuan untuk menanggulangi kemiskinan.

5.2 Rekomendasi

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga mengenai saran berdasarkan hasil penelitian. Secara umum peneliti

menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi sangat membantu masyarakat miskin dalam memberikan bantuan-bantuan sosial baik dari segi bantuan langsung tunai maupun non tunai. Menanggulangi kemiskinan memang tidak sepenuhnya bisa teratasi dan harus membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak semudah memperbaiki kemiskinan tetapi pemerintah sudah mengoptimalkan tersebut. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai penyempurnaan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi pihak-pihak atau informan yang terlihat yaitu; Masyarakat miskin, Dosen, dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ada beberapa yang harus diketahui mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dengan memberikan pemahaman mengenai kemiskinan dan menentukan beberapa target setahunnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan berkelanjutan.
5. Terdapat kelebihan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; mendukung bantuan dan memberikan bantuan-bantuan bagi segi tunai maupun non tunai dan harus memiliki data yang *realtime* dan *by name* dan *by address* nya agar dapat di *verifikasi* data nya.
6. Terdapat kekurangan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; masih banyak nya salah sasaran dan tidak tepat dalam penyaluran distribusi bagi pemerintah untuk masyarakat miskin dan juga dalam penyampain informasinya kurang baik habis bagaimana masalahnya banyak kemiskinan gejolaknya dari pengusaha-pengusaha kecil sampai terjepit itu masalahnya yang kita tanyakan dan kurangnya perhatian pemerintah untuk masyarakat.
7. Kualitas bantuan masih terjadi yang kurang memadai seperti beras sembako dan lain-lain yang kurang kualitasnya.

8. Dalam penanggulangan kemiskinan kunci dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah berbasis kepada data dan di lihat tepat atau tidaknya suatu program yang di lakukan oleh desa setempat yang bisa di *support* dengan dana dan di dukung oleh kegiatan kegiatan seperti wirausaha yang di lakukan oleh masyarakat di desa tersebut untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan, dengan kebutuhan dari kegiatan yang ada dari Pemerintah Kabupaten Bekasi di harapkan berjalan dan bisa men-*support* kegiatan yang ada agar focus lebih tepat sasaran sehingga terjadi pengentasan kemiskinan dan masyarakat keluar dari garis kemiskinan baik dari pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia
9. Dalam *Sustainable Development Goals* menanggulangi kemiskinan itu semua harus berbasis data dan harus di *support* agar lebih cepat dan tepat sasaran kemudian cepat terentaskan orang miskin dan keluar dari lingkungan atau garis kemiskinan itu. Dan datanya juga harus *by name* dan *by address* serta harus *real time*.
10. Pemerintah harusnya bisa lebih perhatian kepada masyarakat agar tidak berada di zona kemiskinan terus menerus masyarakat juga ingin bebas dan juga mau berkembang agar tidak mengandalkan pemberian dari pemerintah dan kurang terkontrol dan masih banyaknya salah sasaran dalam pemberian bantuan untuk menanggulangi kemiskinan.

5.2 Rekomendasi

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Adapun rekomendasi yang penulis sajikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebagai berikut:

1. Penelitian lain bisa menggunakan metodologi dan, teori-teori yang berbeda, dan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait topik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi sebagai upaya meningkatkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi menanggulangi kemiskinan, dan diharapkan peneliti dapat meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi, dan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.
2. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi semoga dengan hasil penelitian, memperkaya khazanah Ilmu Administrasi Negara yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk Mahasiswa dan para Dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi Masyarakat Miskin, Dosen dan Dinas Sosial. Dengan harapan bisa bermanfaat dan dapat dipahami bagi Masyarakat, Dosen dan Dinas Sosial tersebut yaitu sebagai berikut:

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga mengenai saran berdasarkan hasil penelitian. Secara umum peneliti menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi sangat membantu masyarakat miskin dalam memberikan bantuan-bantuan sosial baik dari segi bantuan langsung tunai maupun non tunai. Menanggulangi kemiskinan memang tidak sepenuhnya bisa teratasi dan harus membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak semudah memperbaiki kemiskinan tetapi pemerintah sudah mengoptimalkan tersebut. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

11. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai penyempurnaan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
12. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan

pengembangan (*promotif*) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

13. Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi pihak-pihak atau informan yang terlihat yaitu; Masyarakat miskin, Dosen, dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ada beberapa yang harus diketahui mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dengan memberikan pemahaman mengenai kemiskinan dan menentukan beberapa target setahunnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan berkelanjutan.
14. Terdapat kelebihan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; mendukung bantuan dan memberikan bantuan-bantuan bagi segi tunai maupun non tunai dan harus memiliki data yang *realtime* dan *by name* dan *by address* nya agar dapat di *verifikasi* data nya.
15. Terdapat kekurangan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yaitu; masih banyak nya salah sasaran dan tidak tepat dalam penyaluran distribusi bagi pemerintah untuk masyarakat miskin dan juga dalam penyampain informasinya kurang baik habis bagaimana masalahnya banyak kemiskinan gejolaknya dari pengusaha-pengusaha kecil sampai terjepit itu masalahnya yang kita tanyakan dan kurangnya perhatian pemerintah untuk masyarakat.

16. Kualitas bantuan masih terjadi yang kurang memadai seperti beras sembako dan lain-lain yang kurang kualitasnya.
17. Dalam penanggulangan kemiskinan kunci dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah berbasis kepada data dan di lihat tepat atau tidaknya suatu program yang di lakukan oleh desa setempat yang bisa di *support* dengan dana dan di dukung oleh kegiatan kegiatan seperti wirausaha yang di lakukan oleh masyarakat di desa tersebut untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan, dengan kebutuhan dari kegiatan yang ada dari Pemerintah Kabupaten Bekasi di harapkan berjalan dan bisa men-*support* kegiatan yang ada agar focus lebih tepat sasaran sehingga terjadi pengentasan kemiskinan dan masyarakat keluar dari garis kemiskinan baik dari pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia
18. Dalam *Sustainable Development Goals* menanggulangi kemiskinan itu semua harus berbasis data dan harus di *support* agar lebih cepat dan tepat sasaran kemudian cepat terentaskan orang miskin dan keluar dari lingkungan atau garis kemiskinan itu. Dan datanya juga harus *by name* dan *by address* serta harus *real time*.
19. Pemerintah harusnya bisa lebih perhatian kepada masyarakat agar tidak berada di zona kemiskinan terus menerus masyarakat juga ingin bebas dan juga mau berkembang agar tidak mengandalkan pemberian dari pemerintah dan kurang terkontrol dan masih banyaknya salah sasaran dalam pemberian bantuan untuk menanggulangi kemiskinan.

5.2 Rekomendasi

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Adapun

rekomendasi yang penulis sajikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebagai berikut:

3. Penelitian lain bisa menggunakan metodologi dan, teori-teori yang berbeda, dan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait topik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi sebagai upaya meningkatkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi menanggulangi kemiskinan, dan diharapkan peneliti dapat meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi, dan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.
4. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi semoga dengan hasil penelitian, memperkaya khazanah Ilmu Administrasi Negara yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk Mahasiswa dan para Dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi Masyarakat Miskin, Dosen dan Dinas Sosial. Dengan

harapan bisa bermanfaat dan dapat dipahami bagi Masyarakat, Dosen dan Dinas Sosial tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi di harapkan dapat monitoring atau pengawasan dalam penyaluran atau pembagian bantuan baik secara tunai maupun non tunai agar pembagian tersebut dapat tepat sasaran untuk masyarakat dan pembagian bantuan itu harus sesuai bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan serta juga harus merangkul dan diperhatikan lagi masyarakatnya, perlu adanya jadwal pemberian secara terjadwal sehingga masyarakat lebih siap dalam menerimanya, perlu adanya *update* data secara periodik per-triliun, bagi petugas perlu di lakukan pengawasan untuk mengurangi lamban nya bantuan secara langsung, bantuan yang di berikan agar lebih manusiawi dan lebih layak di konsumsi, bantuan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk 1(satu) bulan.
2. Bagi Dosen di harapkan bisa memberikan arahan mengenai kebijakan Pemerintah dalam masalah kemiskinan dan memberikan jalan keluar atau membantu kebijakan yang sudah berjalan oleh pemerintah agar masyarakat tidak berada di garis kemiskinan terus menerus.
3. Bagi masyarakat miskin, di harapkan dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik mungkin yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa terlepas dari kemiskinan.